

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengakibatkan seluruh sistem pemerintahan terendah yang ada di Indonesia diseragamkan menjadi sistem pemerintahan desa. Unit pemerintahan nagari yang terdapat di Sumatera Barat harus diganti dengan sistem pemerintahan desa. Corak pemerintahan desa yang seragam itu berlangsung hingga berakhirnya era kekuasaan Orde Baru.¹

Pada awal era reformasi diberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk dapat menetapkan konstruksi atau bentuk pemerintahan yang sesuai dengan asal-usul dan kondisi sosial masyarakat.² Berdasarkan ketentuan itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi guna memfungsikan kembali pemerintahan nagari.³

Provinsi Sumatera Barat mempunyai 19 wilayah kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota), dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, sedangkan Kota Padangpanjang memiliki luas daerah terkecil.⁴ Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari kabupaten yang ada di Sumatera Barat.

¹ Ermin Said Lubis, Nagari “Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari 1983-2006”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2018), hlm. 1.

² BPS Provinsi Sumatera Barat, *Profil Desa/Nagari di Sumatera Barat 2005-2014*, (Padang: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm.8.

³ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 19.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

Wilayah pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan yaitu: Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut. Pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan berada di Painan.⁵

Kecamatan Bayang merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, terletak pada $100^{\circ} 28,62'$ - $100^{\circ} 44,70'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 04,19'$ - $1^{\circ} 18,58'$ Lintang Selatan.⁶ Luas wilayah Kecamatan Bayang adalah $328,24 \text{ km}^2$ atau $5,71\%$ dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.⁷ Pusat pemerintahan Kecamatan Bayang terletak di Nagari Pasar Baru, yaitu tempat berlokasinya Kantor Camat Kecamatan Bayang.⁸

Kecamatan Bayang memiliki 17 nagari, yaitu: Nagari Pasar Baru, Nagari Api-api Pasar Baru, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Sawah Laweh Pasar Baru, Nagari Asam Kumbang Pasar Baru, Nagari Gurun Panjang, Nagari Gurun Panjang Utara, Nagari Gurun Panjang Selatan, Nagari Gurun Panjang Barat, Nagari Koto Berapak, Nagari Koto Baru Koto Berapak, Nagari Kapujan Koto Berapak, Nagari Kapelgam Koto Berapak, Nagari Kubang Koto Berapak, Nagari Talaok, Nagari Aur-Begalung Talaok, dan Nagari Kapeh Panji Jaya

⁵ BPS Pesisir Selatan, *Pesisir Selatan Dalam Angka 2013/2014*, (Painan: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 3.

⁶ BPS Pesisir Selatan, *Kecamatan Bayang Dalam Angka 2018*, (Painan: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Talaok. Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok merupakan nagari yang baru dibentuk, sebelumnya wilayah nagari itu merupakan bagian dari Nagari Talaok. Pemerintahan Nagari Talaok difungsikan kembali sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Wilayah pemerintahan Nagari Talaok terdiri atas tujuh kampung, yaitu Talaok, Lubuk Aur, Lubuk Begalung, Lubuk Pasing, Apa Jaya, Jambak, dan Ganting.⁹

Dalam perjalanannya Nagari Talaok mengalami pemekaran wilayah, yaitu terbentuknya Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, dan Nagari Aur-Begalung Talaok. Salah satu faktor terjadinya pemekaran Nagari Talaok yaitu luasnya wilayah geografis dan relatif padatnya penduduk. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemerataan nagari, baik pemerataan dalam pembangunan nagari maupun dalam kehidupan sosial masyarakat nagari.¹⁰

Wacana pemekaran Nagari Talaok hingga terbentuk nagari baru membutuhkan waktu tiga tahun. Penyebab lama terwujudnya wacana pemekaran ini dikarenakan adanya pertentangan dari ninik-mamak dan beberapa masyarakat khususnya masyarakat Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok sekarang. Alasan mereka menentang pemekaran Nagari Talaok yaitu pembentukan pemerintahan nagari baru dianggap memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti permasalahan ekonomi dan sosial. Penolakan juga berasal dari ninik-mamak yang

⁹ RPJM Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Tahun 2011-2017, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.*

khawatir pemerintahan nagari baru membuat perpecahan bagi KAN (Kerapatan Adat Nagari).¹¹

Setelah adanya diskusi yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan nagari dan ninik-mamak mengenai dampak positif dengan adanya pemekatan nagari, masyarakat nagari setuju dengan wacana tersebut. Pembentukan nagari baru itu terjadi pada tanggal 30 Juni 2011 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Kampung Ganting, Kampung Jambak, dan Kampung Apa Jaya disatukan menjadi Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok.¹²

Wilayah Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok berbatasan langsung dengan Nagari Aur Begalung Talaok di sebelah utara, Nagari Sawah Laweh Pasar Baru di sebelah selatan, Nagari Batu Hampar, Kecamatan IX Tarusan di sebelah barat, dan Nagari Talaok di sebelah timur.¹³ Berdasarkan data demografi Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok memiliki jumlah penduduk sebanyak 2971 jiwa (laki-laki 1418 dan perempuan 1553).¹⁴

Untuk menjalankan pemerintahan di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok diangkat Pjs Wali Nagari yaitu Iswandi. Tugas selanjutnya adalah pembentukan Badan Musyawarah (Bamus) nagari yang dikoordinasi oleh Pjs Wali Nagari dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

¹³ *Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 40 Tahun 2018* hal. 4-8.

¹⁴ BPS Pesisir Selatan, *Kecamatan Bayang Dalam Angka 2018*, (Painan: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 27.

(Pilwanus) nagari, terpilih 5 orang anggota Badan Musyawarah (Bamus) yang terdiri dari unsur *ninik-mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai/tokoh masyarakat*, *bundo kanduang* dan unsur pemuda.¹⁵

Dinamika pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok menarik diteliti lebih jauh, guna melihat keadaan Nagari Talaok sebelum dimekarkan hingga terbentuknya nagari baru. Selain itu, penelitian ini juga melihat respon masyarakat terkait pemekaran Nagari Talaok. Penelitian ini juga menjelaskan tentang proses pembentukan lembaga pemerintahan nagari yang merupakan hal penting dalam pemerintahan nagari. Dalam konteks itulah penelitian ini diajukan dengan judul “Dinamika Pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2017”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membicarakan tentang dinamika pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih memfokuskan kajian ini, maka persoalan yang akan dikaji dapat dirumuskan melalui pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah proses terbentuknya Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok?
2. Bagaimanakah bentuk konsolidasi pemerintahan pada tahap awal terbentuknya Nagari kapeh Panji Jaya Talaok?
3. Bagaimanakah bentuk usaha pembentukan lembaga pemerintahan dan bentuk interaksi antar lembaga pemerintahan di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok?

¹⁵ RPJM Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Tahun 2011-2017, hlm. 8.

Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 2011 hingga tahun 2017. Batasan awal diambil tahun 2011 karena pada tahun tersebut merupakan awal berdirinya Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Batasan akhir adalah tahun 2017 yang merupakan akhir periode kepemimpinan Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok yang pertama.

Batasan spasial penelitian ini yaitu Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini terdiri atas tiga kampung, yaitu: Kampung Ganting, Kampung Jambak, dan Kampung Apa Jaya. Pada wilayah kenagarian itulah dipelajari dinamika pemerintahan yang berlangsung selama era kepemimpinan walinagari yang pertama.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan proses pemekaran Nagari Talaok sehingga terbentuknya Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok.
2. Menjelaskan bentuk konsolidasi pemerintahan pada tahap awal terbentuknya Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok.
3. Menjelaskan tentang pembentukan lembaga pemerintahan serta interaksi antar lembaga pemerintahan di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok.

Manfaat penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya sejarah yang bermanfaat bagi peneliti lain untuk menulis karya sejarah lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Nagari Kapeh Panji Jaya Talok tentang proses terbentuknya Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok setelah berpisah dari Nagari Talaok.

D. Tinjauan Putaka

Terdapat beberapa karya yang berkaitan dengan pemerintahan nagari di Sumatera Barat seperti buku yang berjudul *Pemerintah Nagari dan Tanah Ulayat*, yang ditulis oleh Prof. Dr. Sjahmunir AM, S.H. Buku itu menjelaskan tentang pemerintahan nagari dan pemerintahan desa di Sumatera Barat. Dalam buku itu juga dijelaskan tentang perubahan sistem pemerintahan di Sumatera Barat dari pemerintahan desa yang terdapat dalam UU No. 5 tahun 1979 kembali ke pemerintahan nagari.¹⁶

Kemudian skripsi yang berjudul “Sejarah Nagari Sasak 1983-2015”, yang ditulis oleh Dewi Wahyuni yang menjelaskan tentang perubahan corak pemerintahan yang ada di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat dari desa menjadi nagari, serta peningkatan status dari nagari menjadi Kecamatan Sasak Ranah Pesisir pada tahun 2004.¹⁷ Persoalan tentang pemerintahan nagari juga ditulis oleh Ermin Said Lubis dalam skripsi “Nagari Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari 1983-2006”. Dalam skripsi itu dijelaskan tentang pemerintahan Nagari Tarung-tarung yang pada awalnya berbentuk pemerintahan desa yang kembali menjadi pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat.¹⁸

¹⁶ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 19.

¹⁷ Dewi Wahyuni, “*Sejarah Nagari Sasak (1983-2015)*”, Skripsi, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2016).

¹⁸ Ermin Said Lubis, “Nagari Tarung-tarung, kecamatan Rao, kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari (1983-2006)”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2018).

Karya tentang pemerintahan nagari selanjutnya ditulis oleh Well Putra Herman dalam judul skripsi “Dinamika Pemerintahan di Nagari Sumpur Kudus 1983-2012”. Fokus kajian skripsi itu yaitu perubahan kehidupan sosial masyarakat Sumpur Kudus, dari pemerintahan desa yang bercirikan hirarki yang bergantung pada pemerintahan pusat yang menimbulkan permasalahan dan berbagai perubahan dalam setiap kehidupan masyarakat di nagari.¹⁹

Karya yang membahas tentang pemerintahan nagari lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafid pada tahun 2019 yang berjudul “Perubahan Pemerintahan Desa ke Nagari: Kajian di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”. Skripsi itu menjelaskan tentang peralihan pemerintahan dari pemerintahan desa menuju pemerintahan nagari di Pariangan tahun 1983-2017.²⁰

Dari kajian terdahulu terlihat bahwa penelitian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kajian ini lebih berfokus kepada awal mula terbentuknya nagari baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Nagari Talaok, Kecamatan Bayang yang melakukan pemekaran. Selain itu, penelitian ini juga belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Analisis

Penelitian tentang dinamika pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok merupakan penelitian tentang sejarah pemerintahan. Nagari merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

¹⁹ Well Putra Herman. “Dinamika Pemerintahan di Nagari Sumpur Kudus 1983-2012”. *Skripsi*. (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas, 2014).

²⁰ Muhammad Hafid, “Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari: Kajian Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas).

Unit pemerintahan nagari yang terdapat pada 12 kabupaten yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.²¹

Konsep pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah dan warga yang diperintah. Pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan memiliki dua arti, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan yang disebut dengan eksekutif, sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).²²

Setiap hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial, selalu tersimpul pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dalam istilah umum disebut sebagai *power* yang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya.²³

Istilah pemerintahan menurut Finer yang dikutip oleh Muhadam Labodo, bahwa setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu pertama,

²¹ BPS Sumatera Barat, “*Profil Nagari di Sumatera Barat 2005-2014*”, (Padang: Badan Pusat Statistik, 2014) hal. ix.

²² Inu Kencana Syafie, “*Pengantar Ilmu Pemerintahan*” (Bandung PT Reflika Aditama) hlm. 20.

²³ Syarif Moeis, “Kekuasaan Wewenang dan Kepemimpinan” dalam *Bahan Ajar* (Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia), hlm. 5.

pemerintahan merujuk pada suatu proses pemerintahan, yaitu kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintahan.²⁴

Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Perkembangan pemerintahan ditentukan oleh perkembangan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan dan tekanan penduduk, ancaman perang atau penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain, dan hal yang menjadi faktor pemicu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintahan atau negara.²⁵

Pada hakikatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman, tertib, dan tentram. Fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.²⁶

Nagari merupakan lembaga sosial politik yang telah membudaya di Sumatera Barat (kecuali mentawai). Setiap upaya yang dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan keberadaan nagari ini di masa lampau, seperti

²⁴ Muhadam Labodo, “Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 17.

²⁵ Ahmad Fakhri Hutauruk, dkk. “Pemerintahan Nagari Rabuhit 1968-2017” dalam *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 8, No. 2, 2019.

²⁶ Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”, dalam *Jurnal Wedana*. Vol. III Nomor 1 April. 2017.

tahun 1946 dan awal tahun 1950-an memperlihatkan kegagalan. Pembentukan pemerintahan desa dalam awal dekade 1980-an dipandang oleh masyarakat sebagai penghapusan nagari sebagai kesatuan hukum adat sekaligus menghilangkan identitas sebagai orang Minangkabau.²⁷

Berdasarkan kerangka analisis itu, maka penelitian ini membahas tentang dinamika pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok pada masa lampau. Selain membicarakan wacana dan proses pemekaran Nagari Talaok yang melahirkan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, juga menganalisis pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, interaksi antar lembaga di nagari bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang memiliki empat tahap, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber atau data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.²⁸ Heuristik atau pengumpulan data guna mendapatkan data primer dan sekunder. Data primernya berupa studi kearsipan ke Kantor Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kantor Camat Bayang, Kantor Bupati Pesisir Selatan, Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan. Sumber-sumber yang digolongkan dalam sumber primer yang telah didapatkan yaitu: *Profil Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Perda Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011* tentang Pembentukan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, yang sebelumnya masuk ke dalam Nagari Talaok, foto-foto arsip pemilihan wali nagari pertama, SK wali nagari, SK Bamus Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, melakukan wawancara dengan wali nagari yang pertama, ketua Bamus Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok,

²⁷ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 265.

²⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1975), hal. 50.

ketua KAN Nagari Talaok, masyarakat Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, petani, ketua pelatih Randai Ganting Saiyo, serta sumber lainnya. Sedangkan sumber sekunder yaitu: buku-buku dan berbagai karya tulis yang berkaitan dengan pemerintahan nagari yang diperoleh dari studi kepustakaan pada Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan perpustakaan Universitas Andalas.

Setelah data didapatkan, maka tahapan selanjutnya yaitu kritik sumber, yaitu pengecekan data-data agar tidak ada kekeliruan sehingga kebenaran dari data dapat dipercaya keasliannya, baik data tertulis maupun data lisan agar data yang didapat layak untuk digunakan dalam penulisan. Interpretasi adalah penafsiran dari data-data yang didapat agar mudah dipahami untuk penelitian. Tahapan terakhir yaitu historiografi, yaitu menghasilkan karya sejarah yang didapat dari hasil penelitian yang telah dirangkum secara keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok. Hal ini dimulai dari letak dan keadaan geografis, mata pencaharian penduduk dan perekonomian, tingkat pendidikan masyarakat, serta sistem sosial dan budaya masyarakat Nagari Kapeh Panji.

Bab III membahas bagaimana proses pembentukan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok. Proses ini dimulai dari wacana pembentukan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, setelah Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok terbentuk, sampai konsolidasi pemerintahan pada tahap awal.

Bab IV membahas hal-hal yang ada dalam pemerintahan nagari, seperti: pemilihan wali nagari defenitif yang pertama, pembentukan Badan Musyawarah Nagari dan lembaga nagari lainnya. Penelitian ini juga menjelaskan bentuk interaksi dari lembaga pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok. Pada Bab V adalah kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.

